

**LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

**1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui realitas pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi dan membantu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama satu periode pelaporan untuk kepentingan:

**a. Akuntabilitas**

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**b. Manajemen**

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

**c. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

**d. Keseimbangan antar Generasi**

Untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### 1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- (e) Catatan Atas Laporan Keuangan

#### Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

#### Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan assetnya dalam

asset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

### **Laporan Operasional**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penyusunan Laporan Operasional, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN / Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah Pusat dan Daerah antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- e. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900 / 010567 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

## **1.3 Sistematika Penulisan Catatan-Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900 / 010567 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, maka sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

### **Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

## **Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca
  - 5.1.1 Aset
  - 5.1.2 Kewajiban
  - 5.1.3 Ekuitas Dana
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2.1 Pendapatan
  - 5.2.2 Belanja
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
  - 5.3.1 Pendapatan
  - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

## **Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan**

## **Bab VII Penutup**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Kinerja Perekonomian nasional dari tahun ke tahun yang semakin mantap dan terkendali merupakan indikator positif bagi perkembangan perekonomian nasional selanjutnya.

Perbaikan perekonomian nasional yang telah tercapai ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro dan moneter, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Cadangan Devisa, Nilai Tukar rupiah, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan kinerja ekspor.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang utama yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya pemerintahan dan bidang fisik infrastruktur. Sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Bidang ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka mendukung program pembangunan yang dilandasi Tri Sakti Bung Karno dan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan.

Bidang sosial budaya dan pemerintahan ditujukan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi, pengembangan pola karier yang terbuka, sinkronisasi dan harmonisasi hubungan dan regulasi antara provinsi dan kabupaten/kota, memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi; pemantapan kondusivitas wilayah; serta pengembangan demokratisasi dan wawasan kebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Dengan visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah “Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul”, perlu melakukan penataan diri baik dari segi sistem, personil maupun pelayanannya untuk dapat mewujudkan PNS yang profesional, bermoral, netral serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana amanat undang-undang.

Untuk mewujudkan visi serta memantapkan eksistensi dan arah perjuangan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan.
2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur.
3. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja.
4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai.
5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi.
6. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi;
2. Meningkatnya kinerja aparatur yang akuntabel;
3. Terwujudnya penerapan penghasilan berdasarkan kinerja;
4. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
5. Meningkatnya jaringan sistem informasi kepegawaian lingkup Provinsi Jawa Tengah;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen kepegawaian yang terintegrasi dan terpadu;
7. Meningkatnya moral dan etika PNS dalam bekerja;
8. Menurunnya jumlah kasus kedisiplinan;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan pegawai di bidang kesehatan jasmani dan rohani;
10. Meningkatnya produktivitas dan kinerja pegawai.

Guna tercapainya visi misi yang telah ditetapkan maka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah dijabarkan dalam program-program setiap tahunnya, adapun program – program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Penyelenggaraan Kepegawaian Dan Perangkat Daerah

## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sumber pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2014 yaitu dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target Rp 7.753.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.574.289.000,- atau menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pendapatan adalah sebesar 59 % dari yang ditargetkan, hal ini disebabkan :

- a. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pengadaan CPNS untuk Formasi Umum Tahun 2014, yaitu:
  - Peserta Seleksi dengan Sistem CAT (*Computer Assisted Test*) dengan target 200.000 peserta yang memenuhi syarat namun hanya 80.732 peserta yang memenuhi syarat.
  - Kabupaten/Kota yang mendapatkan formasi tidak semuanya mengikuti fasilitasi ke BKD Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut menyebabkan target pendapatan dari Fasilitas Umum untuk Seleksi sebesar Rp 4.000.000.000,- hanya dapat terealisasi sebesar Rp 1.614.540.000,- atau sebesar 40,36 %.

- b. Penetapan NIP untuk CPNS formasi Tahun 2014 yang diharapkan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebanyak 30.000 formasi namun hanya mendapatkan 1.412 formasi dan tidak semua Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan formasi. Karena pengadaan CPNS formasi Umum Tahun 2014 baru selesai dilaksanakan pada Desember 2014 maka Penetapan NIP-nya baru diproses/dilaksanakan pada Tahun 2015. Sedangkan penerimaan dari Penetapan NIP sebesar Rp 926.280.000,- atau sebesar 49,80% dari target sebesar Rp 1.860.000.000,- merupakan Penetapan NIP Formasi K2 sebanyak 15.192 formasi.
- c. Tes Kompetensi Pejabat Struktural Kabupaten/Kota atau *Position Competencies Assesment Program* (PCAP) yang direncanakan sebanyak 18 batch, terealisasi sebanyak 16 batch. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/5992/SJ Tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821/011585 tanggal 21 November 2014 dimana untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi dilakukan melalui konsultasi kepada Gubernur melainkan melalui metode seleksi secara terbuka. Sehingga ada 2 (dua) Kab/Kota yang telah mendaftar Fasilitasi PCAP ditangguhkan.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan sebesar Rp 73.804.099.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 41.414.276.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp 32.389.823.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.360.185.576,- terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 26.485.189.533,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 23.874.996.043,- atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 68,23% hal ini dikarenakan adanya:

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Pengadaan CPNS Umum Formasi Tahun 2014, yakni:
  - 1) Formasi CPNS tahun 2014 dari pelamar umum, untuk pemberkasan NIP baru dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2014 (akhir Tahun Anggaran 2014) sehingga



- 2) Pengadaan CPNS formasi tahun 2014 dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) waktu pendaftaran dan adanya pembatasan pelamar untuk mendaftar berdampak pada jumlah pelamar, yakni untuk pelamar provinsi dari yang ditargetkan 25.000 hanya tercapai 4.197 pelamar dan untuk fasilitasi kab/kota dari yang ditargetkan 308.470 hanya tercapai 80.742 pelamar. Hal ini mengakibatkan belanja langsung untuk kegiatan Pengadaan CPNS dari anggaran sebesar Rp 9.779.267.000 hanya terealisasi sebesar Rp 4.617.323.750 atau 47,22%.
- b. Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembinaan Praja IPDN realisasi belanjanya hanya 62,39% atau Rp 970.398.000 dari anggaran sebesar Rp 1.555.410.000,- karena pendaftaran baru dibuka setelah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mengumumkan hasil seleksi. Jumlah pendaftar yang ditargetkan 2.000 orang hanya terdapat 1.122 orang.
  - c. Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS hanya terealisasi sebesar 67,49% atau Rp 704.320.700 dari anggaran sebesar Rp 1.043.559.000,- karena menurunnya minat PNS untuk mengikuti Tugas Belajar.
  - d. Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS hanya terealisasi Rp 1.708.385.700,- atau 74,40 % dari anggaran sebesar Rp 2.296.000.000,- karena adanya perubahan regulasi Kenaikan Pangkat Bagi Jabatan Fungsional Guru sehingga dari yang semula ditargetkan 24.000 usul kenaikan pangkat hanya terealisasi 19.000 usul kenaikan pangkat.
  - e. Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi Ujian Kedinasan hanya terealisasi sebesar Rp 289.495.415,- atau 77,77% dari anggaran sebesar Rp 372.220.000,- karena adanya beberapa PNS yang telah mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah.
  - f. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya terealisasi Rp 227.087.750,- atau 84,39% dari anggaran sebesar Rp 267.500.000,- karena penawaran dari pihak ke-tiga/terkait tidak sesuai dengan Tupoksi.

### **3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan, yakni adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan yaitu Mengevaluasi kembali target-target pencapaian kegiatan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijakan yang berdampak pada pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

Satuan Kerja Prangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah

Fungsi : 1.20.10

Sub. Fungsi : 1.20.10

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan
		( Rp )	( Rp )	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>41.414.276.000</b>	<b>26.490.045.033</b>	<b>63,95</b>	<b>63,95</b>	
1	Gaji dan Tunjangan	26.061.839.000	13.209.573.833	50,69	50,69	Penetapan NIP Honorer K2 baru selesai tahun 2014 sehingga Penggajiannya mulai tahun 2015; CPNS formasi 2014 baru pemberkasan pada tanggal 29 Desember 2014 sehingga Penggajiannya mulai tahun 2015.
2	Tambahan Penghasilan PNS	15.352.437.000	13.275.615.700	86,47	86,47	
<b>02</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>32.389.823.000</b>	<b>23.874.996.043</b>	<b>99,40</b>	<b>73,71</b>	
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
01	Penyediaan jasa surat-menyurat	29.040.000	29.030.000	100	99,97	
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	683.000.000	548.412.069	100	85,96	Terkait pelaksanaan CPNS yang dilaksanakan dengan CAT, mengurangi kegiatan-kegiatan internal seperti rapat-rapat di ruang BKD
03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	116.148.000	115.068.000	100	99,07	
04	Jaminan barang milik daerah	75.000.000	74.174.436	100	98,90	
05	Penyediaan alat tulis kantor	922.894.000	881.990.275	100	95,57	
06	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	510.614.000	405.239.000	100	79,36	
07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	26.400.000	26.305.300	100	99,64	
08	Penyediaan peralatan rumah tangga	43.752.387	44.991.600	100	99,23	
09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.200.000	13.200.000	100	100	
10	Penyediaan makanan dan minuman	176.300.000	176.244.600	100	99,97	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	1.000.000.000	942.830.860	100	99,28	
12	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	1.139.295.000	1.069.995.000	100	93,92	
<b>II</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					
01	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	429.000.000	404.728.000	100	98,41	

02	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1.565.373.000	1.505.055.500	100	96,15	
03	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	508.650.000	492.833.424	100	96,89	
04	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	86.840.000	86.613.500	100	99,74	
05	Pemeliharaan rutin / berkala meubelair	12.100.000	12.062.000	100	99,69	
06	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor dan rumah tangga	242.900.000	237.410.000	100	97,74	
07	Peningkatan sarana dan prasarana kantor	772.385.000	752.468.500	100	97,42	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>					
01	Pengadaan pakaian dinas dan Atributnya	198.550.000	195.241.250	100	98,54	
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>					
01	Pendidikan dan pelatihan formal	267.500.000	227.087.750	100	84,89	Penawaran diklat tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah</b>					
01	Penyusunan DSP dan formasi PNS	221.054.000	116.874.225	100	52,87	Sudah adanya program aplikasi on line dari Jakarta, sehingga data dapat dilihat di SAPK dan Simpeg
02	Pengadaan CPNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi Seleksi Pengadaan CPNS Kab/Kota	9.779.267.000	4.617.323.750	90	47,22	1. Pengadaan sewa jaringan tidak dilaksanakan 2. Pendaftaran CPNS bersamaan secara Nasional sehingga pelamar sedikit 3. Penetapan NIP CPNS Formasi umum Tahun 2014 dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015
03	Penataan PNS dalam jabatan struktural	508.837.000	366.863.000	100	72,10	Pelantikan tidak dilaksanakan setiap bulan
04	Penataan PNS dalam jabatan fungsional khusus	98.604.000	87.310.300	100	88,55	Efisiensi Anggaran honorarium pemeriksa berkas, narasumber.
05	Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1.603.172.000	1.245.754.620	100	76,42	Akomodasi dan transportasi tim pansel dari 7 orang hanya terealisasi 2 orang
06	Pengangkatan CPNS dan kenaikan pangkat PNS	2.296.000.000	1.708.385.700	96,50	74,41	1. Adanya pemberlakuan Permenpan No 16 Tahun 2009 bahwa untuk tim penilai golongan IV jadi kewenangan Kab/Kota ;

						2. Ada regulasi baru untuk model PAK inpassing, tetapi dari tim penilai belum selesai dilaksanakan.
07	Mutasi dan pensiun PNSD	702.900.000	631.966.850	100	99,59	Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Rakor Kepegawaian
08	Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN	1.555.410.000	970.398.000	100	62,39	Jadwal penerimaan IPDN mundur bersamaan dengan penerimaan SNMPTN sehingga pendaftar hanya sedikit
09	Ujian Kedinas PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Kab/Kota	372.220.000	289.495.415	100	77,78	Target peserta ujian dinas tidak terpenuhi karena sudah mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah
10	Tes Kompetensi Pejabat Struktural Pem Prov Jateng dan Fasilitasi Pejabat Struktural Pem Kab/Kota	1.494.119.000	1.226.234.000	100	82,07	Sesuai UU ASN, untuk JPT Kab/Kota harus dilaksanakan seleksi secara terbuka dengan pansel sehingga banyak Kab/Kota yang menunda pelaksanaan PCAP
11	Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural	233.621.000	214.282.900	100	91,72	
12	Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional	16.379.000	16.379.000	100	100	
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	139.700.000	138.865.000	100	99,40	
14	Layanan Administrasi Kepegawaian	167.061.000	137.621.200	100	99,40	Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15	Pemberian Bantuan Uang Duka PNS yang Meninggal Dunia	37.182.000	28.955.000	95,60	77,87	Dengan anggaran tersebut namun hanya terserap 84 orang yang diberi uang duka.
16	Perawatan Kesehatan Fisik dan Mental bagi PNS	291.104.000	264.458.000	100	90,85	
17	Penganugerahan Tanda Jasa kepada PNS Pem Prov Jateng dan Fasilitasi Penganugerahan Tanda Jasa kepada PNS Kab/Kota	317.100.000	270.757.000	100	85,39	Adanya kesalahan kode rekening pada honor peneliti berkas
18	Pembekalan bagi PNS Pem Prov Jateng yang akan purna tugas	484.040.000	476.875.000	100	98,52	
19	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	391.935.000	347.315.529	100	88,62	1. Beberapa kasus tidak dilakukan klarifikasi ; 2. Adanya penyesuaian standarisasi honorarium.
20	Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS	69.520.000	60.200.000	100	86,59	Honor piket untuk Pejabat Struktural tidak terbayarkan karena dalam Standardisasi

						yang boleh terbayarkan hanya Petugas pusat kebugaran
21	Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian	234.348.000	221.088.100	100	94,34	
22	Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian	357.566.000	352.244.208	100	98,51	
23	Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kepegawaian di Jateng	238.719.000	237.177.000	100	99,35	
24	Pengembangan aplikasi Simpeg pada SKPD Prov. Jateng	239.163.000	228.739.700	100	95,64	
25	Pembinaan Kesejahteraan PNS Perempuan Prov. Jateng	91.300.000	88.989.100	100	97,47	
26	Bimtek Pembinaan PNS	159.775.000	153.801.150	100	96,26	
27	Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jateng	169.535.000	161.822.992	100	95,45	
28	Pengelolaan Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BN)	160.085.000	156.158.740	100	97,55	
29	Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng	1.043.559.000	704.320.700	100	67,49	Peminat Tugas Belajar berkurang karena adanya kenaikan TPP yang lebih besar dari tunjangan belajar
30	Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum	114.016.000	113.358.800	100	99,42	
	<b>Jumlah Total Belanja</b>	<b>73.804.099.000</b>	<b>50.365.041.076</b>	81,68	68,24	

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyajikan kembali Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 disajikan secara kas menuju akrual dan secara akrual. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menerangkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan secara kas menuju akrual yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Di tahun 2014 merupakan masa transisi dari Laporan Keuangan berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan berbasis akrual. Untuk melengkapi Laporan Keuangan menjadi berbasis akrual maka dibuat Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

#### **4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- 1) Kas di kas daerah
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 4) Tanah
- 5) Peralatan dan Mesin
- 6) Gedung dan Bangunan
- 7) Asset Tetap Lainnya
- 8) Pendapatan
- 9) Belanja

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca**

**5.1.1 Aset**

**5.1.1.1 Aset Lancar**

**5.1.1.1.1 Kas**

**5.1.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

NO	Uraian	2014	2013
1	Tunai	Rp 0	Rp 0
2	Bank	Rp 0	Rp 0
	Jumlah	Rp 0	Rp 0

**5.1.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa)**

NO	Uraian	2014	2013
1	Tunai	Rp 0	Rp 0
2	Bank	Rp 0	Rp 0
	Jumlah	Rp 0	Rp 0

**5.1.1.1.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan**

NO	Uraian	2014	2013
1	Tunai	0	Rp 0
2	Bank	0	Rp 0
	Jumlah	0	Rp 0

**5.1.1.1.2 Persediaan**

**5.1.1.1.2.1 Persediaan Bahan Pakai Habis**

NO	NAMA JENIS BARANG	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	NILAI PERSEDIAAN
	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>			
1	Amplop PUTIH besar	7	Rp 23.200	Rp 162.400
2	Amplop PUTIH KECIL	18	Rp 13.000	Rp 234.000
3	Amplop PUTIH tanggung	10	Rp 21.200	Rp 212.000
4	Album Jumbo	1	Rp 75.000	Rp 75.000
5	Album Jumbo	5	Rp 96.000	Rp 480.000
6	Ballpoint BOLLINER hitam, PILOT	5	Rp 17.500	Rp 87.500
7	Ballpoint Faster Merah	33	Rp 4.000	Rp 132.000
8	Ballpoint Faster hitam	36	Rp 4.000	Rp 144.000
9	Ballpoint Gel ink pen black 0,5 mm	72	Rp 7.000	Rp 504.000
10	Bantalan Stempel	23	Rp 11.000	Rp 253.000
11	Bantalan penghitung uang	1	Rp 4.000	Rp 4.000
12	Bantalan penghitung uang	35	Rp 5.000	Rp 175.000
13	Batubaterai Besar ABC	23	Rp 21.000	Rp 483.000
14	Batubaterai kecil ABC	7	Rp 8.000	Rp 56.000
15	Batu Kamera SANYO Ni-MH2500 HR-3U 1.2V	10	Rp 49.500	Rp 495.000
16	Batu baterai REMOTE A2 ALKALIN	4	Rp 10.000	Rp 40.000
17	Batu Baterai kotak 9V	25	Rp 35.000	Rp 875.000
18	Binder Clips	60	Rp 19.350	Rp 1.161.000



19	Box File	13	Rp	20.000	Rp	260.000
20	Buku Expedisi isi 100	26	Rp	17.000	Rp	442.000
21	Buku Tulis Folio isi 100	42	Rp	17.000	Rp	714.000
22	Buku Tulis Folio isi 200	4	Rp	31.500	Rp	126.000
23	Buku Tulis kwarto isi 200	18	Rp	14.000	Rp	252.000
24	Buku Tulis Kwarto isi 100	90	Rp	6.500	Rp	585.000
25	Buku Tulis isi 38	59	Rp	3.000	Rp	177.000
26	Buku Tulis isi 38	32	Rp	2.800	Rp	89.600
27	Card Reader Witer	3	Rp	45.000	Rp	135.000
28	Casset Mini DV	8	Rp	92.600	Rp	740.800
29	CD-RW	97	Rp	9.000	Rp	873.000
30	CD-R	39	Rp	3.000	Rp	117.000
31	CD-DVD	74	Rp	10.500	Rp	777.000
32	CALCULATOR	13	Rp	135.000	Rp	1.755.000
33	Cutter kecil	71	Rp	7.000	Rp	497.000
34	Cutter besar	60	Rp	20.000	Rp	1.200.000
35	Disket 2 HD FUJI	477	Rp	5.000	Rp	2.385.000
36	Data Print (DP 27)	19	Rp	28.000	Rp	532.000
37	Data Print (DP 27)	60	Rp	27.000	Rp	1.620.000
38	Data Print (DP.28)	12	Rp	28.000	Rp	336.000
39	Data Print (DP.28)	72	Rp	27.000	Rp	1.944.000
40	Data Print (DP.615) unt. HP.15-45	10	Rp	37.500	Rp	375.000
41	Flash Disk	2	Rp	100.000	Rp	200.000
42	Gunting	28	Rp	13.000	Rp	364.000
43	Isi ballpoint PENTEL	53	Rp	21.000	Rp	1.113.000
44	Isi Cutter kecil	100	Rp	4.500	Rp	450.000
45	Isi Cutter besar	21	Rp	15.000	Rp	315.000
46	Isi Staples besar	123	Rp	3.100	Rp	381.300
47	Isi Staples kecil	5	Rp	1.200	Rp	6.000
48	Isolasi PANFIK besar dan Kecil	31	Rp	18.000	Rp	558.000
49	Karbon Double Folio Daito	35	Rp	100.000	Rp	3.500.000
50	Karbon Double Folio Daito	3	Rp	85.900	Rp	257.700
51	Karbon Folio	15	Rp	35.000	Rp	525.000
52	Karet Gelang	24	Rp	24.500	Rp	588.000
53	Kertas continouse form 1ply 9,5 x 11"	6	Rp	175.000	Rp	1.050.000
54	Kertas continouse form 1ply 9,5 x 11"	10	Rp	176.000	Rp	1.760.000
55	Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11"	6	Rp	240.000	Rp	1.440.000
56	Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11"	2	Rp	243.000	Rp	486.000
57	Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11"	5	Rp	270.000	Rp	1.350.000
58	Kertas continouse form 2ply 9,5 x 11"	1	Rp	205.280	Rp	205.280
59	Kertas continouse form 2ply 9,5 x 11"	5	Rp	180.000	Rp	900.000
60	Kertas continouse form 2ply 14 7/8 x 11"	12	Rp	275.000	Rp	3.300.000
61	Kertas continouse form 2ply 14 7/8 x 11"	1	Rp	350.000	Rp	350.000
62	Kertas HVS DF BERGARIS	23	Rp	36.000	Rp	828.000
63	Kertas HVS double FOLIO 70 gr	19	Rp	75.000	Rp	1.425.000
64	Kertas HVS Folio JAMBON	9	Rp	53.000	Rp	477.000
65	Kertas HVS Folio BIRU	4	Rp	53.000	Rp	212.000
66	Kertas HVS Folio KUNING	2	Rp	53.000	Rp	106.000
67	Kertas HVS Folio HIJAU	4	Rp	53.000	Rp	212.000
68	Kwitansi Panjang	22	Rp	14.000	Rp	308.000
69	Lak ban coklat	11	Rp	11.000	Rp	121.000

70	Lem kertas	47	Rp	6.000	Rp	282.000
71	Pembolong 40 XL-KENKO	60	Rp	44.000	Rp	2.640.000
72	Pembolong 40 XL-KENKO	30	Rp	90.000	Rp	2.700.000
73	Penggaris Plastik 30 cm	73	Rp	7.000	Rp	511.000
74	Penggaris 40 cm / AMC	23	Rp	8.000	Rp	184.000
75	Penggaris 40 cm / AMC	100	Rp	10.000	Rp	1.000.000
76	Penghapus Black Board/Papan Tulis	30	Rp	8.700	Rp	261.000
77	Penghapus Black Board/Papan Tulis	17	Rp	7.800	Rp	132.600
78	Pita Epson LX - 300	12	Rp	73.000	Rp	876.000
79	Pita Epson LX - 310	8	Rp	73.000	Rp	584.000
80	Pita mesin ketik hitam, DAITO	64	Rp	16.500	Rp	1.056.000
81	Pita Printer LQ 2170/2180	25	Rp	185.000	Rp	4.625.000
82	Portable / Map bertali	165	Rp	4.800	Rp	792.000
83	Remover RZA, MAX	53	Rp	21.000	Rp	1.113.000
84	Refil Toner Laserjet 06 F / 06 L + drum	2	Rp	280.000	Rp	560.000
85	Refil Toner Laserjet 1300/ 13A + drum	1	Rp	306.000	Rp	306.000
86	Refil Toner Laserjet 1000/15A + drum	1	Rp	330.000	Rp	330.000
87	Refil Toner Laserjet 29 X + drum	2	Rp	560.000	Rp	1.120.000
88	Refil Toner Laserjet 2100 / 96A + drum	1	Rp	350.000	Rp	350.000
89	Refil Tinta Epson ber-ID Botol 60 ml black	4	Rp	100.800	Rp	403.200
90	Refil Tinta Epson ber-ID Botol 60 ml yellow	1	Rp	100.800	Rp	100.800
91	Refil Tinta Epson ber-ID Botol 60 ml cyan	1	Rp	100.800	Rp	100.800
92	Setip Ballpoint / PELIKAN	234	Rp	3.200	Rp	748.800
93	Setip Ballpoint / PELIKAN	100	Rp	3.500	Rp	350.000
94	Snelheakter / Stopmap PLASTIK	4	Rp	16.000	Rp	64.000
95	Sneleker kertas	800	Rp	2.500	Rp	2.000.000
96	Spidol kecil warna hitam, biru & merah	461	Rp	1.000	Rp	461.000
97	Spidol MARKER besar hitam	161	Rp	5.800	Rp	933.800
98	Stabilo/Boss	211	Rp	8.500	Rp	1.793.500
99	Stapler / staples HD-10 Kecil	84	Rp	30.000	Rp	2.520.000
100	Stapler / staples HD-50 Besar	109	Rp	55.000	Rp	5.995.000
101	Stip pencil, STEADLER	163	Rp	2.500	Rp	407.500
102	Tali Rafia besar	38	Rp	22.500	Rp	855.000
103	Tinta Hp INKJET C.9351A Black 21	9	Rp	230.400	Rp	2.073.600
104	Tinta Hp INKJET C.9352 Colour 22	10	Rp	370.000	Rp	3.700.000
105	Tinta HP INKJET 3326 / 27	13	Rp	255.000	Rp	3.315.000
106	Tinta HP INKJET 3325 / 28	5	Rp	300.000	Rp	1.500.000
107	Tinta Catridge Hp INKJET 60 black	6	Rp	222.000	Rp	1.332.000
108	Tinta Catridge Hp INKJET 60 color	6	Rp	265.200	Rp	1.591.200
109	Tinta Hp INKJET .730 / 703 black	10	Rp	225.000	Rp	2.250.000
110	Tinta Hp INKJET .730 / 703 colour	13	Rp	235.000	Rp	3.055.000
111	Toner Laserjet HP 29 X	1	Rp	1.439.000	Rp	1.439.000
112	Toner Printer HP Laserjet 6 L, 06 F	1	Rp	867.600	Rp	867.600
113	Toner printer HP laserjet 2100 C.4096.A - (96A)	2	Rp	1.150.000	Rp	2.300.000
114	Toner printer HP Laserjet 1200 C.7115.A - (15A)	3	Rp	950.000	Rp	2.850.000
115	Toner Printer HP Laserjet CB.540 Black	3	Rp	950.000	Rp	2.850.000
116	Toner Printer HP Laserjet CB.541 Cyan	2	Rp	990.000	Rp	1.980.000
117	Toner Printer HP Laserjet CB.542 Yellow	3	Rp	990.000	Rp	2.970.000
118	Toner Printer HP Laserjet CB.543 Magenta	2	Rp	990.000	Rp	1.980.000
119	Tinta nomerator warna UNGU, LION	141	Rp	10.000	Rp	1.410.000
120	Tinta nomerator warna UNGU, LION	51	Rp	11.000	Rp	561.000

121	Tinta nomerator warna HITAM	8	Rp	11.000	Rp	88.000
122	Tip Ex	133	Rp	38.500	Rp	5.120.500
	<b>JUMLAH ALAT TULIS KANTOR</b>				<b>Rp</b>	<b>123.682.480</b>
	<b>ALAT TULIS KANTOR PERUBAHAN</b>					
1	Kertas HVS Folio 70 gr F.4	7	Rp	40.000	Rp	280.000
2	Kertas Countinous Form 4 ply 14 7/8 x 11" carbon	53	Rp	562.000	Rp	29.786.000
3	Pita Cartridge Compuprint 10300 type PRKN 102	-	Rp	810.000	Rp	-
4	Tita Cartridge HP 21 Black	5	Rp	230.400	Rp	1.152.000
5	Tita Cartridge HP 22 Colour	5	Rp	370.000	Rp	1.850.000
6	Tita asli epon T.6641 BK - Black	5	Rp	110.000	Rp	550.000
7	Tita asli epon T.6642 C - Cyan	5	Rp	110.000	Rp	550.000
8	Tita asli epon T.6643 M - Magenta	5	Rp	110.000	Rp	550.000
9	Tita asli epon T.6644 Y - Yellow	5	Rp	110.000	Rp	550.000
10	Tita Cartridge Brother LC.400 - Black	3	Rp	234.000	Rp	702.000
11	Tita Cartridge Brother LC.400 - Yellow	1	Rp	138.000	Rp	138.000
12	Tita Cartridge Brother LC.400 - Cyan	1	Rp	138.000	Rp	138.000
13	Tita Cartridge Brother LC.400 - Magenta	1	Rp	138.000	Rp	138.000
14	Toner Laserjet HP Q 2612 A	-	Rp	1.000.000	Rp	-
15	Toner Laserjet HP Q 2613 A	7	Rp	1.100.000	Rp	7.700.000
16	Toner Laserjet HP CB 435 A	-	Rp	950.000	Rp	-
17	Toner Laserjet HP CB 436 A	3	Rp	950.000	Rp	2.850.000
18	Toner Laserjet HP CB 540 A Black	3	Rp	950.000	Rp	2.850.000
19	Toner Laserjet HP CB 541 A Cyan	2	Rp	990.000	Rp	1.980.000
20	Toner Laserjet HP CB 542 A Yellow	2	Rp	990.000	Rp	1.980.000
21	Toner Laserjet HP CB 543 Magenta	2	Rp	990.000	Rp	1.980.000
22	Toner Laserjet HP Q 5949 A	9	Rp	1.200.000	Rp	10.800.000
23	Toner Laserjet HP Q 7553 A	-	Rp	1.200.000	Rp	-
24	Toner Laserjet HP CE 278 A	-	Rp	950.000	Rp	-
25	Toner Laserjet HP CE 285 A	10	Rp	1.000.000	Rp	10.000.000
	<b>JUMLAH ALAT TULIS KANTOR PERUBAHAN</b>				<b>Rp</b>	<b>76.524.000</b>
	<b>JUMLAH ALAT TULIS KANTOR</b>				<b>Rp</b>	<b>200.206.480</b>
	<b>BARANG CETAKAN</b>					
1	Amplop BKD Besar	3500	Rp	2.300	Rp	8.050.000
2	Amplop BKD Besar Berkantong	1500	Rp	3.000	Rp	4.500.000
3	Amplop BKD Kecil	850	Rp	1.300	Rp	1.105.000
4	Amplop BKD Kecil berkantong	550	Rp	1.500	Rp	825.000
5	Amplop BKD Kwarto berkantong	800	Rp	2.000	Rp	1.600.000
6	Amplop BKD Kwarto berkantong	800	Rp	2.200	Rp	1.760.000
7	Amplop BKD Kwarto	900	Rp	2.000	Rp	1.800.000
8	Amplop GUBERNUR Besar / kabinet	3300	Rp	2.300	Rp	7.590.000
9	Amplop GUBERNUR Kecil	2500	Rp	1.300	Rp	3.250.000
10	Amplop SETDA Besar / kabinet	1100	Rp	2.250	Rp	2.475.000
11	Amplop SETDA Kecil	2200	Rp	1.300	Rp	2.860.000
12	Blangko DP.3	1	Rp	300.000	Rp	300.000
13	Blangko Format Model DK / SKUMPTK	4	Rp	130.000	Rp	520.000
14	Blangko Bukti Pematongan PPh Pasal 21 final	10	Rp	70.000	Rp	700.000
15	Blangko Bukti Pematongan PPh Pasal 21 final	10	Rp	64.000	Rp	640.000
16	Blangko Pematongan PPh Pasal 23	10	Rp	70.000	Rp	700.000
17	Buku Agenda Surat Masuk	17	Rp	57.000	Rp	969.000

18	Buku Agenda Surat Keluar	4	Rp	70.000	Rp	280.000
19	Buku Agenda Surat Keluar	25	Rp	57.000	Rp	1.425.000
20	Buku Kas Umum ( BKU ) Pengeluaran	15	Rp	70.000	Rp	1.050.000
21	Buku Kas penerimaan bend.1	9	Rp	70.000	Rp	630.000
22	Buku penilaian kinerja Pegawai	300	Rp	90.000	Rp	27.000.000
23	Buku Pajak dan PPN, PPH Bend. 17	15	Rp	70.000	Rp	1.050.000
24	Buku Bon Barang NCR	15	Rp	24.500	Rp	367.500
25	Disposisi warna Merah	46	Rp	100.000	Rp	4.600.000
26	KENDALI Surat Masuk	146	Rp	13.000	Rp	1.898.000
27	KENDALI Surat Keluar	75	Rp	12.000	Rp	900.000
28	Kop Surat BKD ( Pinggir )	177	Rp	119.000	Rp	21.063.000
29	Kop Surat GUBERNUR ( Pinggir )	17	Rp	119.000	Rp	2.023.000
30	Kop Surat Gubernur untuk SK	29	Rp	119.000	Rp	3.451.000
31	Surat Setoran Pajak ( SSP )	21	Rp	75.000	Rp	1.575.000
32	Surat Tanda Setoran ( STS )	1	Rp	70.000	Rp	70.000
33	Surat perintah perjalanan dinas pegawai (SPPD)	1	Rp	130.000	Rp	130.000
34	Surat Bukti Pengeluaran C5 bend. 22 ( B.10.12 )	118	Rp	41.500	Rp	4.897.000
35	Stopmap BKD Rahasia	450	Rp	6.000	Rp	2.700.000
36	Stopmap BKD Folio Berlogo 5 warna	1800	Rp	6.000	Rp	10.800.000
37	Stopmap BKD kwarto Berlogo 5 warna	1800	Rp	5.000	Rp	9.000.000
38	Stopmap BATIK	550	Rp	6.000	Rp	3.300.000
					<b>Rp</b>	<b>137.853.500</b>
	<b>BARANG CETAKAN PERUBAHAN</b>					
1	Kertas Kop Surat Gubernur untuk SK Logo Emas	2	Rp	250.000	Rp	500.000
					<b>Rp</b>	<b>500.000</b>
	<b>JUMLAH CETAK</b>				<b>Rp</b>	<b>138.353.500</b>
	<b>JUMLAH ALAT TULIS DAN CETAK</b>				<b>Rp</b>	<b>338.559.980</b>

\*Sumber Stock Opname barang Triwulan IV

### 5.1.1.2 Aset Tetap

No	Uraian	2014	2013
1	Tanah	Rp. 6.421.500.000	Rp. 6.421.500.000
2	Peralatan & Mesin	Rp. 8.375.433.159	Rp. 8.138.755.440
3	Gedung & Bangunan	Rp. 6.321.497.700	Rp. 6.321.497.700
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp. 799.998.000	Rp. 799.998.000
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 19.456.000	Rp. 16.532.500
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 0	Rp. 0
7	Akumulasi penyusutan	Rp. (9.124.538.687,16)	Rp. ( 4.233.602.877)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 12.813.346.171,84</b>	<b>Rp. 17.464.680.763</b>

Rincian mutasi aset terdiri dari :

Penambahan	2014
Belanja Modal dan Penilaian	Rp. 1.157.196.500
Belanja Barang / Jasa	Rp. 16.625.000
Hibah	Rp. 0
Mutasi Masuk	Rp. 0
Reklasifikas	Rp. 197.915.756
Koreksi	Rp. 0
Penilaian	Rp. 0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.371.737.256</b>

<b>Pengurangan</b>	<b>2014</b>
Penghapusan	Rp. 0
Ekstrakontable	Rp. 5.350.000
Reklasifikasi	Rp. 1.126.786.037
Hibah	Rp. 0
Mutasi Keluar	Rp. 0
Koreksi	Rp. 0
Penyusutan	Rp. 1.094.561.577,36
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.226.697.614,36</b>

#### 5.1.1.2.1 Tanah

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1	Tanah	Rp. 6.421.500.000	Rp. 6.421.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.421.500.000</b>	<b>Rp. 6.421.500.000</b>

#### 5.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1	Alat-alat Berat	Rp. 37.205.000	Rp. 0
2	Alat-alat Angkutan	Rp. 1.833.464.768	Rp. 1.970.186.768
3	Alat-alat Bengkel	Rp. 0	Rp. 0
4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 0	Rp. 0
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 6.141.027.085	Rp. 5.872.148.122
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp. 218.817.656	Rp. 158.501.900
7	Alat-alat Kedokteran	Rp. 56.498.650	Rp. 49.498.650
8	Alat-alat Laboratorium	Rp. 0	Rp. 0
9	Alat Meteorologi dan Geofisika	Rp. 0	Rp. 0
10	Alat-alat Keamanan	Rp. 0	Rp. 0
11	Alat-alat Olahraga	Rp. 88.420.000	Rp. 88.420.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 8.375.433.159</b>	<b>Rp. 8.138.755.440</b>

#### 5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1	Gedung	Rp. 6.321.497.700	Rp. 6.321.497.700
2	Bangunan	Rp. 0	Rp. 0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.321.497.700</b>	<b>Rp. 6.321.497.700</b>

#### 5.1.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1	Jalan dan Jembatan	Rp. 0	Rp. 0
2	Bangunan air / Irigasi	Rp. 0	Rp. 0
3	Instalasi dan Jaringan	Rp. 799.998.000	Rp. 799.998.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 799.998.000</b>	<b>Rp. 799.998.000</b>

#### 5.1.1.2.5 Aset tetap Lainnya

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1	Buku Perpustakaan	Rp. 19.456.000	Rp. 16.532.500
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebud	Rp. 0	Rp. 0
3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	Rp. 0	Rp. 0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 19.456.000</b>	<b>Rp. 16.532.500</b>

### 5.1.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2014	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Koreksi/Penyesuaian Saldo Awal (Bertambah)	Saldo Awal Stlh Koreksi Penyesuaian	Penyesuaian Penyusutan	Beban Penyusutan 2014	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Per 31 Desember 2014
<b>A</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>8.287.013.159,31</b>	<b>1.382.633.444,50</b>	<b>4.520.079.462,80</b>	<b>5.902.712.907,30</b>	<b>923.598.080</b>	<b>945.819.207,80</b>	<b>5.924.934.035,10</b>	<b>2.362.079.124,21</b>
1	ALAT BESAR	37.205.000,00	-	-	-	-	3.720.500,00	3.720.500,00	33.484.500,00
2	ALAT ANGKUT	1.833.464.768,00	1.382.633.444,50	-	1.382.633.444,50	550.000.000	150.350.274,50	982.983.719,00	850.481.049,00
3	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	6.141.027.085,31	-	4.374.343.252,80	4.374.343.252,80	367.328.080	750.924.902,10	4.757.940.074,90	1.383.087.010,41
4	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	218.817.656,00	-	104.109.560,00	104.109.560,00	6.270.000	35.385.531,20	133.225.091,20	85.592.564,80
5	ALAT KEDOKTERAN	56.498.650,00	-	41.626.650,00	41.626.650,00	-	5.438.000,00	47.064.650,00	9.434.000,00
<b>B</b>	<b>GEDUNG, BANGUNAN DAN MONUMEN</b>	<b>6.321.497.700,00</b>	<b>2.850.969.432,59</b>	<b>-</b>	<b>2.850.969.432,59</b>	<b>-</b>	<b>128.742.419,56</b>	<b>2.979.711.852,15</b>	<b>3.341.785.847,85</b>
1	BANGUNAN GEDUNG	6.321.497.700,00	2.850.969.432,59	-	2.850.969.432,59	-	128.742.419,56	2.979.711.852,15	3.341.785.847,85
<b>C</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>799.998.000,00</b>	<b>-</b>	<b>199.892.850,00</b>	<b>199.892.850,00</b>	<b>-</b>	<b>19.999.950,00</b>	<b>219.892.800,00</b>	<b>580.105.200,00</b>
1	INSTALASI	799.998.000,00	-	199.892.850,00	199.892.850,00	-	19.999.950,00	219.892.800,00	580.105.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.408.508.859,31</b>	<b>4.233.602.877,09</b>	<b>4.719.972.312,80</b>	<b>8.953.575.189,89</b>	<b>923.598.080</b>	<b>1.094.561.577,36</b>	<b>9.124.538.687,25</b>	<b>6.283.970.172,06</b>

### 5.1.1.2.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	2014	2013
1	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0	Rp. 0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>

### 5.1.1.3 Aset Lainnya

No	Uraian	2014	2013
1	Aset Lain-lain	Rp. 0	Rp. 0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>

### 5.1.3 Ekuitas Dana

#### 5.1.3.1 Ekuitas Dana Lancar

NO	Uraian	2014	2013
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp. (45.785.896.576)	Rp. (31.311.614.286)
2	Pendapatan yang ditangguhkan	Rp. 0	Rp. 0
3	Cadangan Piutang	Rp. 0	Rp. 0
4	Cadangan Persediaan	Rp. 338.559.980	Rp. 331.763.656
5	Dana yg harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp. 0	Rp. 0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. (45.447.336.596)</b>	<b>Rp. (30.979.850.630)</b>

#### 5.1.3.2 Ekuitas Dana Investasi

NO	Uraian	2014	2013
1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp. 0	Rp. 0
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 12.813.346.171,84	Rp. 17.464.680.763
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	Rp. 928.870.281,00	Rp. 0
4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp. 0	Rp. 0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 13.742.216.452,84</b>	<b>Rp. 17.464.680.763</b>

## 5.2 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

### 5.2.1 Pendapatan

#### 5.2.1.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

NO	Uraian	2014	2013
1	Hasil Penjualan Aset daerah yang tdk dipisahkan	Rp. 0	Rp. 0
2	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp. 0	Rp. 0
3	Penerimaan Fasilitas Sosial & Fas Umum	Rp. 2.540.820.000	Rp. 24.614.000
4	Penerimaan dari Penyelenggaraan Diklat	Rp. 1.813.469.000	Rp. 1.910.797.000
5	Pendapatan dari pengembalian	Rp. 0	Rp. 0
6	Penerimaan Jasa dana bergulir	Rp. 0	Rp. 0
7	Pendapatan BLUD	Rp. 0	Rp. 0
8	Penerimaan Lainnya	Rp. 220.000.000	Rp. 51.975.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.574.289.000</b>	<b>Rp. 1.987.386.000</b>

### 5.2.2 Belanja

#### 5.2.2.1 Belanja Operasi

##### 5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

NO	Uraian	2014	2013
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>26.485.189.533</b>	<b>Rp. 11.625.832.271</b>
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>6.035.064.600</b>	<b>Rp. 6.102.263.945</b>
1	Honorarium PNS	4.343.776.600	Rp. 4.153.758.545
2	Honorarium Non PNS	1.691.288.000	Rp. 1.948.505.400
3	Uang Lembur	0	Rp. 0
	<b>Jumlah</b>	<b>38.555.318.733</b>	<b>Rp. 17.728.096.216</b>

##### 5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

NO	Uraian	2014	2013
1	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 1.342.575.525	Rp. 1.717.664.850
2	Belanja Bahan / Material	Rp. 82.212.000	Rp. 119.227.000
3	Belanja Jasa Kantor	Rp. 2.195.091.469	Rp. 1.538.032.609
4	Belanja Premi Asuransi	Rp. 74.174.436	Rp. 29.407.500
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 492.833.424	Rp. 278.971.869
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 913.149.440	Rp. 1.070.658.590
7	Belanja Sewa Rumah/ Gedung / Gudang / Parkir	Rp. 1.614.399.240	Rp. 973.071.100
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp. 79.300.000	Rp. 92.000.000
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp. 1.905.042.830	Rp. 290.991.000
10	Belanja Makan dan Minum	Rp. 927.265.350	Rp. 918.303.838
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp. 132.921.250	Rp. 110.810.000
	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 62.320.0000	Rp. 0
12	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 3.715.707.229	Rp. 61.636.000
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp. 629.274.000	Rp. 3.663.975.359
14	Belanja kursus, Lat, sos & bintek PNS	Rp. 225.182.750	Rp. 516.926.000
15	Belanja Pemeliharaan	Rp. 1.841.141.000	Rp. 249.671.650
16	Belanja Jasa Konsultansi	Rp. 392.845.000	Rp. 2.150.442.205
17	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp. 57.300.000	Rp. 0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 14.727.146.193</b>	<b>Rp. 14.034.588.570</b>

### 5.2.2.1.3 Belanja Modal

#### 5.2.2.1.3.1 Belanja Modal Peralatan & Mesin

NO	Uraian	2014	2013
1	BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 404.728.000	Rp. 523.296.000
2	BM Pengadaan Peralatan Kantor	Rp. 138.810.000	Rp. 73.900.000
3	BM Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp. 178.907.000	Rp. 293.386.000
4	BM Pengadaan Komputer	Rp. 341.212.000	Rp. 297.231.000
5	BM Pengadaan Mebeulair	Rp. 83.616.000	Rp. 339.523.500
6	BM Pengadaan Alat-alat Kedokteran	Rp. 7.000.000	Rp. 6.480.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.154.273.000</b>	<b>Rp. 1.533.816.500</b>

#### 5.2.2.1.3.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

NO	Uraian	2014	2013
1	BM Pengadaan Buku/Kepustakaan	Rp. 2.923.500	Rp. 2.499.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.923.500</b>	<b>Rp. 2.499.000</b>

## 5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

### 5.3.1. Pendapatan

#### 5.3.1.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

NO	Uraian	2014	2013
1	Hasil Penjualan Aset daerah yang tdk dipisahkan	Rp. 0	Rp. 0
2	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp. 0	Rp. 0
3	Penerimaan Fasilitas Sosial & Fas Umum	Rp. 2.540.820.000	Rp. 24.614.000
4	Penerimaan dari Penyelenggaraan Diklat	Rp. 1.813.469.000	Rp. 1.910.797.000
5	Pendapatan dari pengembalian	Rp. 0	Rp. 0
6	Penerimaan Jasa dana bergulir	Rp. 0	Rp. 0
7	Pendapatan BLUD	Rp. 0	Rp. 0
8	Penerimaan Lainnya	Rp. 220.000.000	Rp. 51.975.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.574.289.000</b>	<b>Rp. 1.987.386.000</b>

### 5.3.2. Belanja

#### 5.3.2.1 Beban Operasi

##### 5.3.2.1.1 Beban Pegawai

No.	Uraian	2014
I.	Belanja Tidak Langsung	26.485.189.533
II.	Belanja Langsung	6.035.064.600
	<b>Jumlah</b>	<b>32.520.254.133</b>

##### 5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	2014
1.	Beban Persediaan	3.453.647.241,00
2.	Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas	12.310.534.628,00
3.	Beban Penyusutan	1.094.561.577,36
4.	Beban Piutang Tak Tertagih	0
5.	Beban Lain-Lain	911.756.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.770.500.196,36</b>



## 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### 5.4.1. Laporan Perubahan Ekuitas

<b>(dalam rupiah)</b>			
NO	URAIAN	2014	2013
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	17.796.444.419,00	
2	SURPLUS/DEFISIT LO	69.431.246,64	
	SURPLUS/DEFISIT LO	(45.716.465.329,36)	
	RK PPKD	45.785.896.576,00	
	KAS BENDAHARA	-	
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(3.785.099.232,80)	
	KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG		
	KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG TIDAK TERTAGIH		
	KOREKSI/PENYESUAIAN PERSEDIAAN		
	KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI NON PERMANEN		
	KOREKSI/PENYESUAIAN ASET TETAP	11.275.000	
	KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET TETAP	(3.796.374.232,80)	
	KOREKSI/PENYESUAIAN ASET LAINNYA		
4	EKUITAS AKHIR	14.080.776.432,84	17.796.444.419,00

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Gambaran Umum**

Secara historis Badan Kepegawaian Daerah lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Selanjutnya nama lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai di sebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A yang menegaskan :”Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah”.

Berdasar Ketentuan Tersebut diatas maka untuk pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan fungsi manajemen kepegawaian yang semula dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, yaitu Badan Kepegawaian Daerah.

Oleh karena itu pada tahun 2001 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 *tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pemb Lintas Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Badan Kepegawaiaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27)* dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menempati kantor di Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang.

Sehubungan adanya PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 dirubah Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai lembaga baru yang lahir di era reformasi, Badan Kepegawaian Daerah dengan mengemban amanat sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah, mulai menata diri dengan melakukan penataan dari segi sistem, personil maupun pelayanannya.

Guna memantapkan eksistensi dan arah perjuangan dalam mengemban amanat tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi yaitu **“Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul ”** sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap personil Badan Kepegawaian Daerah dalam bekerja selalu mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang dilayani sesuai tugas tanggung jawab masing-masing dan bahwa tugas yang diemban tersebut merupakan amanah yang wajib dijalankan secara profesional, sehingga dapat terwujud PNS yang Profesional, Bermoral, Netral sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya untuk mewujudkan visinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi yang selanjutnya dijabarkan dalam program-program kegiatan setiap tahunnya. Dalam mengemban misinya dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya Badan Kepegawaian Daerah berusaha memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dan komputer dengan mendayagunakan serta meningkatkan kemampuan personilnya. Hasilnya telah terwujud beberapa program aplikasi komputer untuk pengelolaan data dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

Di samping itu sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, telah dikembangkan beberapa program kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan kualitas manajemen kepegawaian.

## 6.2 Penyelenggaraan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sejak Berdirinya hingga sekarang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh:

1. Widadi, SH	30 Juni 2001	s/d	4 Maret 2006
2. Drs Agus Setianto	4 Maret 2006	s/d	31 Agustus 2011
3. Suko Mardiono, SH, MM	9 September 2011	s/d	Sekarang

## 6.3 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

### 6.3.1 Misi

Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Daerah Yang Profesional dan Unggul

### 6.3.2 Misi

1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan.
2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur.
3. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja.
4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai.
5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi.
6. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.

## 6.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) :

*Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur pendukung tugas Gubernur dibidang kepegawaian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.*

#### **6.4.1 Fungsi Badan Kepegawaian Daerah**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai fungsi:

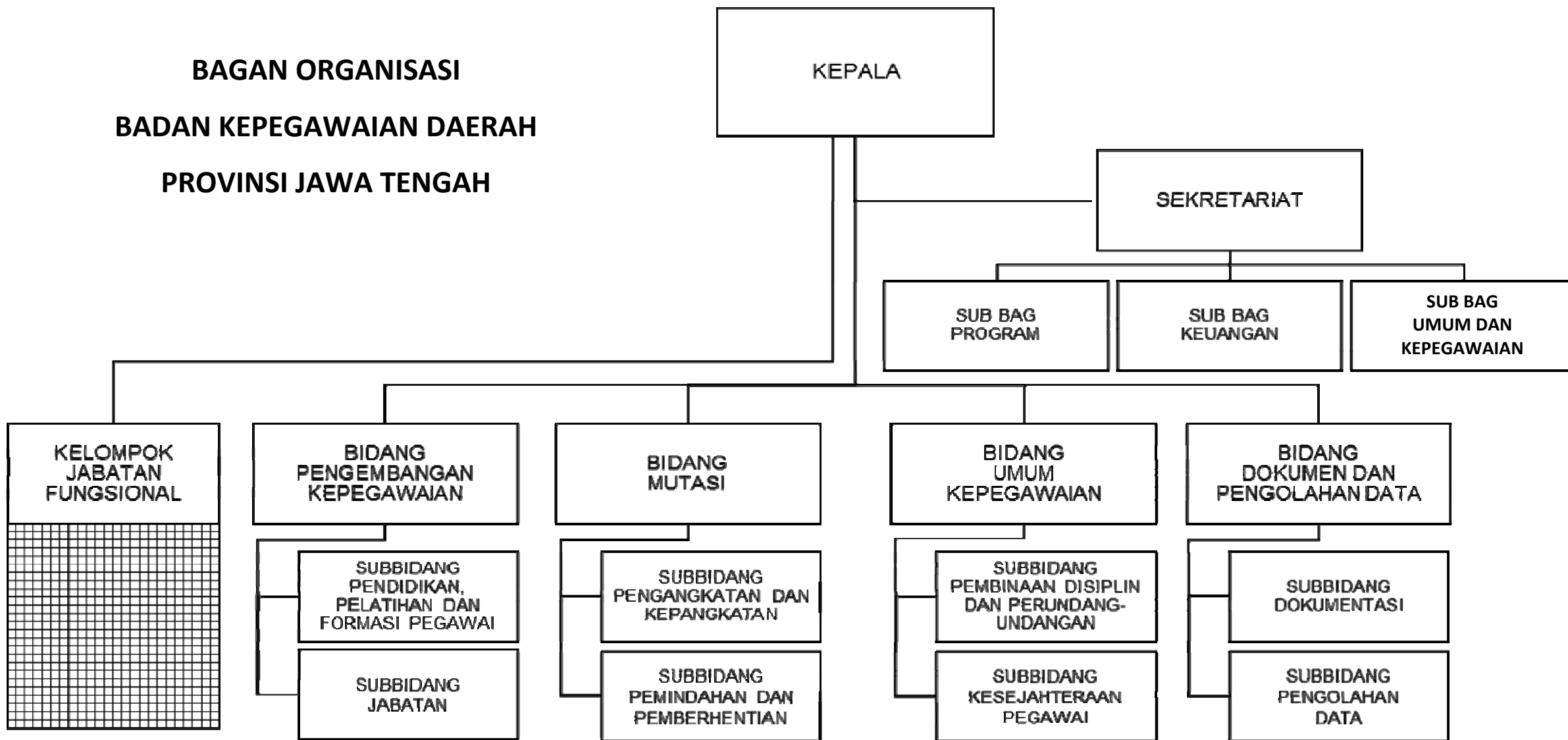
1. Perumusan kebijakan teknis dbidang kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, Umum Kepegawaian, dokumen dan pengolahan data Pegawai Negeri sipil lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
5. Pelaksanaan Kesekretariatan badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **6.5 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang membawahi tiga sub bagian, dan empat Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi masing-masing dua Sub Bidang.

Adapun gambar struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 ini kami susun untuk dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahannya yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di tahun yang akan datang, sekaligus sebagai pertanggung jawaban Pengguna Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah.